

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILEGAL

(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan)

Oleh:

DARLIUS KHALIK

Masalah kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api merupakan hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana senjata api dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber terdiri dari Penyidik Reskrim Polres Tangerang Selatan, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis secara kualitatif dari narasumber.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal pada wilayah hukum Kota Tangerang Selatan dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal pada wilayah hukum Kota Tangerang Selatan yaitu yang pertama dari faktor substansi hukum tingkat sanksi yang relatif ringan. Faktor kedua pada penegak hukum yaitu lemahnya pengawasan dan kesadaran aparat penegak hukum untuk tidak memperjualbelikan. Faktor ketiga sarana dan prasarana, proses penegakan hukum memadai, namun yang menjadi penghambat dalam menjalankan sarana dan prasarana tersebut terletak pada sumber daya manusia untuk mempergunakan sarana dan prasarana yang ada.

Darlius Khalik

Faktor masyarakat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari tindakan kepemilikan senjata api secara ilegal. Terakhir faktor kebudayaan adanya tradisi adat budaya. Faktor penghambat dalam proses penegakan hukum yang paling dominan ada pada masyarakat itu sendiri yang belum banyak mengetahui dan memahami akan bahayanya senjata api dalam hal kepemilikan senjata api secara ilegal.

Saran dalam penelitian ini diharapkan Polresta Tangerang Selatan meningkatkan adanya operasi di setiap lingkungan masyarakat, dan masyarakat juga diharapkan sebagai tindak lanjut dan membantu tugas kepolisian dengan cara memberi laporan adanya suatu tindak pidana.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Senjata Api, Ilegal

ABSTRACT

ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACTS OF ILLEGAL POSSESSION OF FIREWEAPONS (CASE STUDY AT THE SOUTH TANGERANG CITY POLICE RESORT)

By

DARLIUS KHALIK

The issue of ownership of firearms is very dangerous and high-risk. Where firearms can result in the loss of life of a person or many people. The problems in this study are as follows how is the law enforced against perpetrators of the crime of illegal possession of firearms and what are the inhibiting factors in law enforcement against the crime of illegal possession of firearms.

This study was conducted using a normative legal and empirical legal approach. The data collection procedure was carried out by means of literature study and field study. The sources consisted of the Criminal Investigation Unit Investigator of the South Tangerang Police, the Prosecutor at the South Tangerang District Attorney's Office and Academics from the Criminal Law Division of the University of Lampung. Data analysis was carried out by conducting qualitative analysis from the sources.

The results of the study and discussion show that Law enforcement against perpetrators of illegal firearms possession in the jurisdiction of South Tangerang City is carried out in three stages, namely the formulation stage, the application stage and the execution stage. Law enforcement against criminal acts of firearms possession is regulated in Emergency Law Number 12 of 1951. The factors that inhibit law enforcement against perpetrators of illegal firearms possession in the jurisdiction of South Tangerang City are the first from the legal substance factor, the relatively light level of sanctions. The second factor in law enforcement is the weak supervision and awareness of law enforcement officers not to trade. The third factor is facilities and infrastructure, the law enforcement process is adequate, but the obstacle in implementing these facilities and infrastructure lies in human resources to use the existing facilities and infrastructure.

Darlius Khalik

Community factors are low public awareness of the legal consequences of such actions. Finally, cultural factors are the existence of cultural traditions. The most dominant inhibiting factor in the law enforcement process is the community itself, which does not yet know and understand the dangers of firearms in terms of illegal possession of firearms.

Recommendations from this research include : It is hoped that the South Tangerang Police will increase operations in every community environment. The community is also expected to follow up and assist the police by reporting any criminal acts.

Keywords: Law Enforcement, Firearms, Illegal.